

## KESESUAIAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT DENGAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Anggi Nadila Putri<sup>1</sup>, Pancawati Hardiningsih<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Stikubank Semarang

[angginadilaputri@mhs.unisbank.ac.id](mailto:angginadilaputri@mhs.unisbank.ac.id)

### Abstrak

Laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mengambil keputusan bagi pihak eksternal. Laporan keuangan yang diaudit mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, total aset, PAD dan opini audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Metode penelitian adalah kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder. Data penelitian berupa laporan keuangan pemerintah daerah provinsi yang diperoleh dari BPK. Data penelitian berupa laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diperoleh dari BPK. Penelitian ini menggunakan sampel berupa laporan keuangan pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2018 sampai 2021. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengujian pada penelitian ini berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian adalah Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah maka H1 diterima. Total aset dan Pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah maka H2 & H3 ditolak. Opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, maka dari itu H4 ditolak. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh maka tidak akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan, hal itu dikarenakan pemerintah belum efektif dan efisien dalam kekayaan daerah itu sendiri.

**Kata Kunci:** Jumlah Penduduk, Total Aset, PAD, Opini Audit, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### Abstract

Financial reports are an important matter as a form of accountability for making decisions for external parties. The audited financial statements follow the applicable government accounting standards. The purpose of this study was to determine the effect of population, total assets, PAD and audit opinion on the level of disclosure of provincial government financial reports in Indonesia. The research method is quantitative and data collection techniques use secondary data. The research data is in the form of provincial government financial reports obtained from the BPK. Research data in the form of provincial government financial reports were obtained from BPK. This study used a sample in the form of provincial government financial reports for the 2018 to 2021 fiscal year. Sampling used a purposive sampling method. Tests in this study were in the form of descriptive statistical analysis, classical assumption tests and hypothesis testing. The result of the study is that the number of residents has a positive influence on the disclosure of local government financial reports, so H1 is accepted. Total assets and local revenue have no effect on the level of disclosure of local government financial reports, so H2 & H3 are rejected. Audit opinion has a negative effect on the level of disclosure of local government financial statements, therefore H4 is rejected. The higher the regional original income obtained, it will not increase the disclosure of financial statements, this is because the government has not been effective and efficient in the regional wealth itself.

**Keywords:** Total Population, Total Assets, PAD, Audit Opinion, Local Government Financial Statements

### PENDAHULUAN

Disaat ini akuntansi bagian publik alami kemajuan yang lumayan cepat. Penerapan akuntansi bagian publik paling utama entitas pemerintah semakin banyak menemukan kepedulian dibanding era sebelumnya. Ada permintaan yang lebih besar dari warga guna dicoba keterbukaan serta akuntabilitas publik oleh lembaga- lembaga bagian publik (Khasanah, 2014).

Pemerintah pusat ataupun wilayah dalam

melakukan pengelolaan finansial wajib profesional, bagus serta akuntabel menyatakan jika hakikatnya uang yang diatur penguasa itu berawal dari penduduk (Nurtari, *et al*, 2016). Oleh sebab itu pengelolaan finansial wajib maksimal, dapat dipertanggung jawabkan serta berguna untuk semua penduduk. Sebagai pihak yang melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan serta jasa penduduk, Pemerintah daerah( pemda) dituntut lebih guna melaksanakan dan menciptakan keterbukaan serta

akuntabilitas kepada pengelolaan finansial supaya terwujud pemerintah yang bersih (Cristiana & Maryono, 2020). Usaha konkrit yang sanggup dicoba ialah harus mengantarkan informasi pertanggungjawaban berbentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun bersumber pada Standar Akuntansi Pemerintah (Masdiantini dan Erawati, 2016).

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 mengharuskan pemimpin negara serta Gubernur ataupun Bupati maupun Walikota guna mengantarkan informasi pertanggung jawaban penerapan APBN atau APBD berbentuk laporan keuangan. Laporan keuangan itu mencakup Informasi Realisasi APBN atau APBD, Neraca, Informasi Arus Kas, serta Catatan atas Informasi Finansial (Asyrofi, 2016). Laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mengambil ketetapan untuk pihak eksternal. Laporan keuangan yang diaudit wajib dilengkapi dengan pengungkapan yang mencukupi (Setiawan & Maryono, 2022). Kategorisasi informasi finansial wajib menajaki Standar Akuntansi Pemerintahan yang resmi (Arifin dan Fitriyasari, 2014).

Laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mengambil keputusan bagi pihak eksternal. Maka dari itu laporan keuangan yang diaudit harus dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai. Pembuatan laporan keuangan harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Tujuan pelaporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan memadai serta untuk mengetahui bagaimana proses keuangan dari perusahaan secara menyeluruh dalam periode tertentu. Informasi yang memadai akan lebih mudah untuk dipahami dan tidak menimbulkan salah persepsi apabila laporan keuangan tersebut diungkapkan dengan pengungkapan (*disclosure*) yang memadai (Setiawan & Maryono, 2022).

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP Nomor 71 tahun 2010. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 juga dipertegas tentang “Keuangan Negara” yang mengamanatkan bahwa “laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

**Tabel 1. Temuan Kelemahan SPI (Sistem Pengendalian Internal) dan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2021**

| Keterangan | Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
|------------|--------------|-----------------|
|------------|--------------|-----------------|

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| A. Kelemahan SPI  | 14 | -         |
| • Kelemahan SPI   | 14 | -         |
| B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan                          | 16 | 11.341,77 |
| • Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan: |    |           |
| Kerugian  | 5  | 11.072,38 |
| Potensi Kerugian  | 2  | 269,39    |
| Kekurangan Penerimaan   | 1  | -         |
| Subtotal  | 8  | 11.341,77 |
| • Penyimpangan administrasi   | 8  | -         |
| C. Temuan   |    |           |
| Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan                                    | -  | -         |
| • Ketidakhematan  | -  | -         |
| • Ketidakefisienan  | -  | -         |
| • Ketidakefektifan  | -  | -         |
| Total (A+B+C)   | 30 | 11.341,77 |

Sumber: IHP BPK Semester II (2021)

Kelemahan SPI pada sebuah entitas dapat meningkatkan risiko pengendalian, yakni risiko kecurangan (*fraud*), penggelapan, serta tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara/daerah. Undang-undang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Ayat (22), mendefinisikan kerugian negara sebagai, “kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Bentuk-bentuk kerugian Negara adalah: 1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan, 2) pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku, 3) hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima, 4) penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai), 5) timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada, 6) timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari seharusnya, 7) hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku, dan 8) hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang

seharusnya diterima. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, berbagai bentuk kerugian tersebut diklasifikasikan menjadi enam macam temuan yaitu: temuan kerugian negara, temuan potensi kerugian, temuan kekurangan penerimaan, temuan administrasi, temuan ketidakefektifan, dan temuan pemborosan (Teriyani et al., 2022)..

Pengungkapan dibagi jadi 2 ialah pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) serta pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*). Pengungkapan harus merujuk dalam pengungkapan data di pada informasi keuangan Pemerintah Daerah yang berdasar dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 hal Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengungkapan lengkap (*full disclosure*) ialah informasi finansial yang menyuguhkan dengan cara komplit hal data yang diperlukan oleh konsumen. Data itu sanggup ditempatkan dalam lembar wajah (*on the face*) informasi finansial ataupun CaLK. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan melebihi yang diwajibkan (Hardiningsih et al., 2019).

Penerapan pengungkapan pada informasi finansial bersumber pada Standar Akuntansi Rezim (SAP) di Indonesia masih sungguh sedikit. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan rata-rata nilai pengungkapan wajib pada data tahun selama tahun 2012 hingga tahun 2014 adalah 41,7663% (Hendriyani dan Taher, 2015), (Martani dan Liestiani, 2012) dengan data tahun anggaran 2006 sebesar 30,85%, (Syafitri, 2012) sebesar 52,09% dengan data 2008-2009, Sedangkan penelitian pengungkapan LKPD di Provinsi yang dilakukan oleh (Hilmi dan Martini, 2012) dengan menggunakan data tahun 2006 dan 2009 menunjukkan sebesar 44,56%. Perihal ini membuktikan jika pemerintah daerah belum seluruhnya menyampaikan komponen pengungkapan harus akuntansi (Setiawan & Maryono, 2022).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pemasukan yang didapat wilayah yang dipungut bersumber pada Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Hukum No 33 Tahun 2004). Pemerintah perlu mengembangkan serta mengelola potensi-potensi yang ada pada daerah agar dapat menghasilkan manfaat serta kekayaan daerah yang digunakan sebagai fasilitas atau pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar kekuatan wilayah yang diperoleh sehingga terus menjadi besar pula tanggung jawab penguasa pada mengatakan informasi finansial penguasa wilayah. (Widyaningsih dan Srimartina, 2009) mengungkapkan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah berasal dari uang rakyat yang nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Aset ialah jumlah sumber daya yang dimiliki sesuatu entitas guna melaksanakan aktivitas operasional entitas tersebut. Semakin besar jumlah

aset sehingga terus menjadi besar sumber daya maka dikenakan guna melaksanakan pengungkapan yang lebih besar. Namun, jumlah aset yang besar kerap jadi hambatan dalam memberi tahu laporan keuangan untuk penguasa di Indonesia sebab belum seluruh aset yang dimiliki penguasa dicatat dengan bagus. Alhasil terus menjadi besar jumlah aset semakin detail dalam melaksanakan pengungkapan informasi finansial. Riset yang dicoba (Khasanah, 2014) dan (Setiawan & Maryono, 2022), membuktikan jika keseluruhan aset mempengaruhi positif serta penting kepada tingkatan pengungkapan LKPD.

Opini audit ialah statement pengaudit kepada kebiasaan laporan keuangan dari entitas yang sudah diaudit. Kebiasaan ini menyangkut materialitas, posisi finansial, dan arus kas. Opini audit yang diserahkan BPK membuktikan tingkatan kebiasaan dalam LKPD. Opini audit ditetapkan dari jumlah penemuan audit yang didapat pada dikala penerapan audit BPK. Opini audit pula didasarkan pada pengungkapan data yang dicoba. Semakin bagus opini audit yang didapat oleh penguasa wilayah sehingga terus menjadi banyak pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil riset (Rahim dan Martani, 2012) melaporkan jika opini audit mempunyai ikatan positif kepada pengungkapan data finansial

Kriteria BPK dalam pemberian opini atas laporan keuangan terdapat 4, ialah: kesesuaian dengan peraturan SAP, berkecukupan pengungkapan, disiplin kepada hukum, serta hal keefektifitasan sistem pengaturan internal. Pemberian pandangan dari BPK dalam penguasa wilayah kabupaten ataupun kota di Jawa Tengah diakui, aset tetap menjadi penyebab pengecualian dalam opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), karena belum seluruhnya tanah pemda dimiliki, dikuasai dan bersertifikat. (Cristiana & Maryono, 2022), selain aset, persoalan lainnya yaitu pemasukan asli wilayah yang berasal dari hasil pajak wilayah, hasil retribusi wilayah, hasil pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan, serta lain-lain pemasukan asli wilayah yang legal. Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kompleksitas, Total Aset, PAD dan Opini Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

*Stewardship theory* ialah filosofi yang mendeskripsikan suasana dimana para manajemen bukanlah termotivasi oleh tujuan-tujuan orang namun lebih tertuju dalam target hasil penting mereka guna kebutuhan kelompok (Hardiningsih et al., 2019). Filosofi penting yang terikat dengan tingkatan pengungkapan dan *good governance* adalah teori *agency* dan teori *stewardship* (Daniri, 2005).

Teori stewardship merupakan gambaran dimana para steward bukanlah termotivasi dengan tujuan-tujuan orang semacam modul serta uang tetapi lebih tertuju dalam hasil penting mereka untuk kebutuhan bersama (Raharjo, 2007). Filosofi ini mempunyai dasar intelektual ataupun ilmu masyarakat yang didesain dimana para akseptor terpercaya (*steward*) termotivasi guna melaksanakan kegiatan serupa dengan kemauan pihak sponsor terpercaya (*principal*), tidak hanya itu untuk menggapai target kelompok, sikap (akseptor terpercaya) *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya.

#### Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah daerah menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah proses kategorisasi serta penyajian LKPD yang dilaksanakan cocok dengan peraturan penguasa yang menata mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Menurut (Suwanda, 2013) LKPD digunakan untuk menilai keadaan finansial, menilai daya guna serta kemampuan sesuatu entitas pelaporan dan menolong dalam memastikan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan yang lengkap berisi mengenai neraca, laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba-rugi dan catatan maupun laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. LKPD yang tersaji dilampiri ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. Selanjutnya BPK akan memeriksa laporan keuangan yang telah diserahkan untuk diaudit. Setelah LKPD diaudit oleh BPK kemudian diserahkan pada DPRD guna diresmikan serta diulas dengan peraturan wilayah hal pertanggungjawaban penerapan APBD.

#### Jumlah Penduduk

Penduduk adalah sekumpulan orang yang dengan cara sah menghuni sesuatu area ataupun negeri yang mentaati seluruh ketentuan-ketentuan dari sesuatu area atau negeri yang mereka tempati. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia penduduk merupakan seluruh orang yang berkedudukan dalam area geografis Republik Indonesia yang berjalan sepanjang 6 bulan atau lebih serta itu mereka yang berkedudukan kurang dari 6 bulan tetapi mempunyai misi guna bermukim. Sensus

masyarakat dilaksanakan tiap 10 tahun sekali, sensus itu ialah basis penting informasi kependudukan. Pada sensus masyarakat, penghitungan dilaksanakan dalam semua masyarakat yang beralamat di pada area

kedaerahan Indonesia yang tercantum masyarakat negeri asing lain badan korps diplomatik negeri saudara bersama keluarganya.

#### Total Aset

Aset ialah sumber daya yang dipahami sesuatu industri selaku dampak dari insiden era kemudian yang diharapkan akan mendatangkan khasiat hemat guna era depan untuk sesuatu industri. Khasiat ekonomi era depan yang terkabul dalam aset

ialah kemampuan dari asset itu guna membagikan donasi, baik langsung atau tidak langsung, arus kas serta sebanding kas pada industri. Keseluruhan peninggalan diseleksi sebab memiliki angka normal dibanding dengan pemasaran serta investasi pasar. Dengan keseluruhan aset yang besar pemerintah mengarah lebih lingkungan guna mengatur serta melindungi aset tersebut.

#### Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengenai penguasa wilayah serta Hukum No 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan finansial antara penguasa pusat serta penguasa wilayah sumber pemasukan wilayah terdiri dari Pendapatan asli Daerah (PAD), Anggaran Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang legal.

#### Opini Audit

Opini audit ialah cara pengauditan yang dicoba oleh seseorang pengaudit independen. Setelah melalui tahapan audit, opini audit akan diberikan sehingga seorang auditor dapat menyimpulkan hal opini audit apa yang wajib diserahkan atas informasi finansial yang sudah diaudit. Opini audit bisa dikatakan baik apabila seorang auditor bisa mengungkapkan jika informasi finansial yang sudah diaudit itu cocok dengan PSAK dan tidak ada hal yang menyimpang secara material.

#### METODE

Metode penelitian adalah kuantitatif dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Data penelitian berupa laporan keuangan pemerintah daerah provinsi yang diperoleh dari BPK. Riset ini memakai sampel berbentuk informasi finansial pemerintah provinsi dalam tahun anggaran 2018 sampai 2021. Pengumpulan ilustrasi memakai cara *purposive sampling*. Pengujian dalam riset ini berbentuk analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis diberikan sehingga seorang auditor dapat menyimpulkan mengenai opini audit apa yang wajib diserahkan atas informasi finansial yang sudah diaudit. Opini audit bisa dikatakan baik apabila seorang auditor bisa mengungkapkan jika informasi finansial yang sudah diaudit itu sesuai dengan PSAK dan tidak ada hal yang menyimpang secara material (Waliyyani & Mahmud, 2015).

$$DISC = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yang harus diungkapkan}} \times 100$$

#### Jumlah Penduduk

Penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu seluruh orang yang berkedudukan dalam area geografis Republik Indonesia kurang lebih 6 bulan serta memiliki misi berdiam. Jumlah masyarakat dalam riset ini diukur mengenai hasil sensus masyarakat yang dicoba oleh BPS. Nilai guna jumlah masyarakat diganti pada struktur logaritma alamiah disebabkan tingkatan variabilitasnya tinggi (Priharjanto dan Wardani,

2015).

$$Kompleksitas = Ln \text{ Jumlah Penduduk}$$

### Total Aset

Aset ialah sumber daya ekonomi yang dipunyai oleh pemerintah selaku dampak dari suatu insiden dalam periode kemudian (Lesmana, 2010). Serupa perihalnya dengan pemasukan asli wilayah, keseluruhan peninggalan memiliki variabilitas yang tinggi sehingga perlu ditransformasi dalam metode logaritma (Hilmi, 2011);Cristiana & Maryono (2020)

$$Aset = Ln \text{ Total Aset}$$

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan kekayaan yang dipunyai oleh sesuatu wilayah. Pendapatan ini diterima dari sumber-sumber yang ada pada wilayah wilayah khusus yang didapat bersumber pada Hukum yang legal. PAD bermaksud buat menyediakan pemerintah pada perihal pendanaan guna kebutuhan otonomi wilayah sebagai perwujudan desentralisasi (Setiawan & Maryono, 2022) ; (Hardiningsih et al., 2019)

$$PAD = Ln \text{ Total Pendapatan Asli Daerah}$$

### Opini Audit

Opini audit merupakan evaluasi hasil pengecekan informasi finansial penguasa wilayah yang diserahkan BPK pada penguasa daerah. Pengukuran opini auditor dalam sampel berupa LKPD pada tahun anggaran 2018-2021. sampel menggunakan metode *purposive sampling* (Hardiningsih et al., 2021). Penelitian ini menggunakan variabel *dummy*, yang mana pemberian pendapat oleh auditor berupa opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) diberi nilai 1 selain *unqualified opinion* diberi nilai 0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Riset ini memakai sampel berbentuk informasi finansial penguasa provinsi di Indonesia rentang waktu tahun anggaran 2018-2021. Sampel diambil berdasarkan teknik *purposive sampling*, artinya sampel didapat bersumber pada patokan khusus yang sudah diresmikan (Yulianingtyas, 2010). Patokan itu antara lain ialah informasi finansial periode 2018 sampai 2021 yang telah diaudit oleh Badan 2018 sampai 2021 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dapat diakses dan menyajikan data keuangan yang lengkap. Data jumlah penduduk Provinsi di Indonesia tahun 2018 sampai 2021 didapatkan dari website Badan Pusat Statistik.

**Tabel 2. Kriteria Sampel Penelitian**

|                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Populasi                              | 34   | 34   | 38   | 38   |
| LKPD Provinsi yang tidak bisa diakses | (22) | (22) | (24) | (26) |
| LKPD yang tidak lengkap               | (2)  | (2)  | (4)  | (2)  |
| Total LKPD                            | 10   | 10   | 10   | 10   |

Sumber: Data Sekunder, 2023

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bermaksud membagikan

cerminan sesuatu informasi yang diamati bersumber pada angka minimal, maksimal, pada umumnya serta standar digresi serupa yang disuguhkan pada bagan 2.

**Tabel 3 Statistik Deskriptif**

| Variabel           | N | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Dev |
|--------------------|---|---------|---------|---------|----------|
| DISC               | 0 | .735135 | .881081 | .810270 | .035788  |
| POP                | 0 | .266897 | .611530 | .367477 | .774339  |
| ASET               | 0 | 3.72420 | 3.93090 | 9.82913 | .102735  |
| PAD                | 0 | 4.69168 | 4.67241 | 1.63360 | .705954  |
| Valid N (listwise) | 0 |         |         |         |          |

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Bersumber pada hasil analisa statistik deskriptif, sanggup disusun uraian dalam tiap- tiap variabel selaku selanjutnya:

Variabel Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (DISC) memiliki angka minimal 0.73 serta angka maksimal 0.88 dengan angka pada umumnya 0.81. Angka pada umumnya mendekati angka paling tinggi, alhasil bisa disimpulkan kalau pengungkapan informasi finansial penguasa wilayah mendapatkan evaluasi yang bagus. Angka standar digresi sebesar 0.03 maksudnya kalau pada umumnya perbandingan kepada angka pada umumnya pengungkapan laporan keuangan pada 40 sampel sebesar 0.03.

Variabel Kompleksitas memiliki angkaminimal 7.26 serta angka maksimal 9.61 dengan angka pada umumnya 8.36. Nilai rata-rata mendekati nilai tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompleksitas permasalahan yang dihadapi masing-masing wilayah tinggi. Angka standar deviasi sebesar 0.77 maksudnya jika pada umumnya perbandingan kepada angka pada umumnya perkembangan ekonomi dalam 40 sampel sebesar 0.77.

Variabel Total Aset memiliki angka minimal 23. 72 serta angka maksimal 33. 93 dengan nilai pada umumnya 29. 82. Nilai pada umumnya mendekati nilai tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai asset pada masing-masing wilayah besar. Nilai standar deviasi sebesar 2. 10 artinya jika pada umumnya perbandingan pada nilai umumnya nilai keseluruhan asset dalam 40 sampel merupakan sebesar 2.10.

Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimal 14. 69 serta nilai maksimal 24. 67 dengan nilai pada umumnya 21. 63. Nilai pada umumnya mendekati angka paling tinggi, alhasil dapat disimpulkan jika penghasilan asli daerah yang dicermati dalam tiap- tiap area besar. Nilai standar deviasi sebesar 1. 70 artinya jika pada umumnya perbandingan kepada nilai pada umumnya pemasukan asli wilayah dalam 40 sampel sebesar 1.70.

Variabel Opini Audit memiliki nilai minimum

sebesar 0 yang berarti Provinsi ini tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Nilai maksimal yang didapat sebesar satu ataupun menemukan opini wajar tanpa pengecualian, opini ini didapat seluruh pemerintah Provinsi di Indonesia. Nilai rata-rata dari opini audit sebesar 0.90 dengan standar deviasi sebesar 0.30 disimpulkan bahwa seluruh wilayah yang diamati memperoleh opini audit yang baik dari BPK.

**Uji Normalitas**

**Tabel 4 Uji Normalitas**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Series: Residuals |           |
| Sample 1 40       |           |
| Observations 40   |           |
| Mean              | 3.14e-17  |
| Median            | 0.005278  |
| Maximum           | 0.040354  |
| Minimum           | -0.069182 |
| Std. Dev.         | 0.026087  |
| Skewness          | -0.652552 |
| Kurtosis          | 2.807373  |
| Jarque-Bera       | 2.900666  |
| Probability       | 0.234492  |

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Uji normalitas bermaksud guna memastikan informasi yang sudah dijumlahkan memiliki distribusi yang normal. Hasil output pada gambar 3 diperoleh nilai probability sebesar 0,234 > 0,05 alhasil dapat disimpulkan jika informasi mempunyai terdistribusi wajar.

**Uji Multikolonieritas**

**Tabel 5 Uji Multikolinearitas**

| Variable    | Coefficient Variance | Uncentered VIF | Centered VIF |
|-------------|----------------------|----------------|--------------|
| POP         | 6.54E-05             | 243.6298       | 2.017425     |
| ASET        | 8.47E-06             | 399.4537       | 1.926015     |
| PAD         | 1.53E-05             | 380.0589       | 2.290380     |
| OPINI_AUDIT | 0.000312             | 14.80100       | 1.480100     |
| C           | 0.004874             | 257.0901       | NA           |

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Uji multikolinieritas bermaksud guna mencoba apakah bentuk regresi ditemui terdapatnya hubungan antara variabel independen. Bentuk regresi yang baik

**Tabel 7 Uji Kesesuaian Determinasi**

| Variable           | Coefficient | Std. Error         | t-Statistic | Prob.    |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|
| POP                | 0.024985    | 0.008088           | 3.089113    | 0.0039   |
| ASET               | -0.002081   | 0.002910           | -0.715141   | 0.4793   |
| PAD                | -0.000336   | 0.003912           | -0.085963   | 0.9320   |
| OPINI_AUDIT        | -0.055389   | 0.017657           | -3.136965   | 0.0035   |
| C                  | 0.720412    | 0.069812           | 10.31935    | 0.0000   |
| R-squared          | 0.468689    | Mean dependent var |             | 0.810270 |
| Adjusted R-squared | 0.407968    | S.D. dependent var |             | 0.035788 |

sebaiknya tidak akan terjalin hubungan di antara variabel independennya. Berdasarkan pengujian terhadap nilai centered VIF yang ada pada tabel 4, tiap-tiap variabel memiliki nilai kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan jika bentuk tidak hadapi permasalahan multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

|                     |          |                     |       |
|---------------------|----------|---------------------|-------|
| F-statistic         | 0.308615 | Prob.F(4,35)        | .8703 |
| Obs*R-squared       | 1.362747 | Prob. Chi Square(4) | .8506 |
| Scaled explained SS | 0.942864 | Prob. Chi-Square(4) | .9183 |

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Percobaan heteroskedastisitas bermaksud guna mencoba apakah pada bentuk regresi terjalin ketidaksamaan variance dari residual satu observasi ke observasi yang lain. Bersumber pada hasil percobaan heteroskedastisitas di atas menunjukkan nilai prob sebesar 0,8703 lebih besar dari 0.05 alhasil bisa simpulkan jika pada riset ini tidak ada pertanda

heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Model analisa regresi berganda bermaksud guna mengetahui akibat dari variable independen kepada variabel dependen. Variabel independen dalam riset ini yaitu kompleksitas, total aset, PAD dan opini audit. Variabel dependen dalam riset ini merupakan tingkatan pengungkapan LKPD Provinsi di Indonesia. Adapun hasil analisis terdapat dalam tabel 6.

**Uji Kesesuaian Model**

Uji Koefisien Determinasi digunakan guna memandang daya variable independen pada menerangkan modifikasi variable dependen.

|                    |          |                       |           |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------|
| S.E. of regression | 0.027537 | Akaike info criterion | -4.230107 |
| Sum squared resid  | 0.026540 | Schwarz criterion     | -4.018997 |
| Log likelihood     | 89.60214 | Hannan-Quinn criter.  | -4.153776 |
| F-statistic        | 7.718698 | Durbin-Watson stat    | 2.516112  |
| Prob(F-statistic)  | 0.000144 |                       |           |

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Bersumber pada hasil dari tabel 7 dapat diamati jika angka adjusted r square sebesar 0,407 sehingga dapat disimpulkan pengaruh variabel independen kompleksitas, total aset, serta pemasukan asli daerah yakni 40, 7 persen, sebaliknya lebihnya sebesar 50, 3 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

#### Uji F

Pengujian F dicoba dengan tujuan guna mengenali tingkat signifikansi pengaruh koefisien regresi dari jumlah penduduk, total aset, PAD dan opini audit secara serempak kepada tingkatan pengungkapan LKPD Provinsi. Hasil uji F tampak pada tabel 6 yang menunjukkan Fhitung sebesar 7,71 > Ftabel dengan rumus  $n-k-1$  sebesar 2,87 dan nilai probabilitas  $F\text{-statistic}$   $0,000 < 0,05$ .

#### Uji T

Berdasarkan tabel 6 dikenal jika  $t$  hitung= 3, 089  $t$  tabel= 1, 6848 serta  $sig= 0, 0039 < \alpha= 0, 05$ . Hasil ini membuktikan jika Jumlah penduduk mempengaruhi positif kepada pengungkapan laporan finansial pemerintah daerah alhasil H1 Diterima.

#### Pengaruh Total Aset terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa  $t$  hitung = -0,715 <  $t$  tabel = -1,6581  $sig = 0,4793 > \alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan total aset tidak mempengaruhi kepada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga  $H_2$  ditolak.

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel 6 dikenal kalau  $t$  jumlah=- 0, 0003 <  $t$  bagan=- 1, 6581 serta  $sig= 0, 9320 > \alpha= 0, 05$ . Hasil ini membuktikan jika pemasukan asli wilayah tidak mempengaruhi kepada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga  $H_3$  ditolak.

#### Pengaruh Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel 6 dikenal jika  $t$  jumlah=- 3, 136 >  $t$  bagan=- 1, 6581 serta  $sig= 0, 0035 > \alpha= 0, 05$ . Hasil ini membuktikan jika opini audit mempengaruhi negatif kepada pengungkapan laporan keuangan daerah sehingga  $H_4$  ditolak.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian membuktikan kompleksitas mempengaruhi positif kepada pengungkapan

LKPD. (Liestiani, 2012) mengatakan bahwa variabel jumlah penduduk mempengaruhi positif kepada pengungkapan laporan keuangan penguasa daerah. Jumlah penduduk yang besar, menyebabkan semakin banyaknya tuntutan pelayanan publik pemerintahan. Beragamnya suatu tuntutan servis akan mendorong pemerintah guna menerangkan dengan cara lebih bagus lagi alhasil pengungkapan laporan keuangan akan meningkat. Semakin berkualitas informasi yang diungkapkan terkait laporan keuangan, maka semakin akuntabel laporan tersebut. Jumlah penduduk adalah sebuah pengukuran yang mendeskripsikan kompleksitas dari sesuatu wilayah. Terus menjadi kompleks pemerintahan itu sehingga akan terus menjadi besar pula tingkatan pengungkapan data keuangan yang dicoba (Adha et al., 2019).

Penelitian ini didukung Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pada pasal 28 yang menyatakan jika besarnya jumlah penduduk akan menggambarkan besarnya keinginan pada penyediaan jasa publik dalam tiap wilayah. Sehingga dari itu banyaknya keinginan akan pelayanan publik dengan cara otomatis akan mendesak penguasa guna menerangkan lebih bagus lagi alhasil akan menaikkan pengungkapan informasi finansial (Priharjanto & Wardani, 2017).

Hasil riset ini disupport oleh riset lebih dahulu yang dicoba oleh (Puspita, 2011) yang berkata jika jumlah masyarakat mempengaruhi positif kepada tingkatan pengungkapan LKPD. Terus menjadi banyak jumlah penduduknya sehingga semakin besar desakan penduduk dalam mengungkapkan LKPD.

### Pengaruh Total Aset terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian membuktikan total peninggalan tidak mempengaruhi kepada pengungkapan LKPD. Perihal ini dapat dimaksud jika terus menjadi besar aset atau kekayaan yang dimiliki pemerintah maka akan meningkatkan risiko salah saji dalam pengungkapan LKPD.

Jumlah aset yang besar ialah hambatan dalam memberi tahu informasi keuangan sebab seluruh aset pemerintah belum seluruh dicatat dengan bagus, pemerintah wilayah harus dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai dengan teori sinyal yaitu dengan mengurangi asimetri informasi dengan memberikan laporan keuangan secara baik dan jelas. Keseluruhan aset yang besar menginginkan pengelolaan aset yang bagus dan benar agar tercipta pengungkapan yang lebih besar, itu sungguh dibutuhkan terikat perlindungan serta pengelolaan aset. Semakin banyak kekayaan yang dikelola pemerintah, akan meningkatkan risiko salah satu pada pengungkapan informasi finansial, alhasil

merendahkan mutu opini audit laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini disupport oleh riset (Hilmi & Martani, 2012) yang menjelaskan jika keseluruhan asset tidak mempengaruhi signifikan kepada tingkatan pengungkapan laporan keuangan pemerintah.

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian menunjukkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Perihal ini sanggup dimaksud jika besar rendahnya indek penghasilan asli wilayah tidak mengurangi ataupun meningkatkan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

PAD selaku salah satu pendapatan daerah yang berawal dari wilayahnya sendiri yang memantulkan tingkatan independensi wilayah (Teriyani et al., 2022). Kekayaan daerah dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah maka dari itu pemerintah wajib menginformasikan pendapatan yang diperoleh, hal ini sesuai dengan teori sinyal yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah bukan menjadi ukuran utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas jika pengelolaan kekayaan daerah tersebut tidak berjalan secara transparan, sehingga apabila pemerintah tidak mengelola kekayaan dengan benar, maka provinsi dengan kekayaan yang besar akan tertinggal dengan provinsi yang tidak memiliki kekayaan besar namun dapat efisien mengelola kekayaan daerah. Riset ini searah dengan riset yang dicoba oleh (Waliyyani & Mahmud, 2015) yang mengatakan jika PAD tidak mempengaruhi kepada tingkatan pengungkapan informasi finansial wilayah.

#### **Pengaruh Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hasil pengetesan membuktikan Opini audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin berkualitas opini yang dikeluarkan maka akan mengurangi tingkat pengungkapan LKPD. Opini audit merupakan sarana untuk seseorang pengaudit dalam melaporkan pendapatnya, opini pengaudit yang ialah kebiasaan dari seluruh perihal yang berhubungan dengan material yang serupa dengan standard dalam SAP (Finakesti et al., 2022). Semakin bagus opini yang diperoleh oleh penguasa sehingga pengungkapan yang disuguhkan akan terus menjadi lebih bagus serta sesuai dengan SAP. Opini audit dapat mengalami penurunan kualitas apabila tidak terdapat konsistensi dalam pengungkapan item-item yang ada dalam SAP. Riset yang dicoba (Narulitasari & Zafira, 2021) melaporkan jika opini audit tidak mempengaruhi kepada tingkatan pengungkapan LKPD serta berputar dengan riset yang dicoba (Hilmi & Martani, 2020), yang melaporkan jika opini audit mempengaruhi kepada

pengungkapan laporan keuangan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang dilakukan pemerintah daerah sebagai upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, maka dari itu  $H_1$  diterima. Total aset tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, maka dari itu  $H_2$  ditolak. Pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, maka dari itu  $H_3$  ditolak. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh maka tidak akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan, hal itu dikarenakan pemerintah belum efektif dan efisien dalam kekayaan daerah itu sendiri. Opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, maka dari itu  $H_4$  ditolak. Karena sebagian besar pemerintah yang mendapatkan opini wajar ataupun tidak wajar sekalipun cenderung akan sama dalam menyajikan laporan keuangannya di dalam LKPD.

### **Saran**

Riset ini dapat dijadikan bahan penilaian, evaluasi serta masukan untuk penguasa pusat dalam membagikan evaluasi kemampuan penguasa yang berhubungan dengan pengungkapan yang diinformasikan ke pada LKPD. Dengan begitu penguasa pusat dapat mempraktikkan *punishment* atau *reward* hal perihal itu serupa dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adha, A. F., Afiah, N. N., & Pratama, A. (2019). Pengaruh Ukuran Entitas Dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Kementerian PUPR. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 122. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.136>
- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset Pada Kabupaten Di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1). <https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1549>
- Chaled, S., Sarumpaet, S., Fanny, D. R., Septiyanti, D. R., Sukmasari, D., Nuraini, F., Andi, K., Amelia, Y., Dharmasari, F., Sari, O., Evana, E., Kesumaningrum, N. D., Syuhada, B. L.,

- Sarumpae, S., Sembiring, S. I. O., Metalia, M., Desriani, N., & Nauli, P. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015*. 4(1).
- Cristiana, I., & Maryono. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, Nopember 2016, Vol. 5, No(January 2016), 185-199 ISSN.
- Daniri Mas Ahmad (2005), *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya di Indonesia*. Ray Indonesia, Jakarta.
- Finakesti, L., Aprianti, S., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(1).
- Hardiningsih, P., O., R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i1.4963>
- Hardiningsih, P., Pramudibyanto, H., Kristiana, I., & Suhadi, S. (2022). Disclosure Determinants of Provincial Financial Statements. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 20(1), 50–64. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v20i1.6631>
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., Jannah, A., & Haryanto, M. Y. D. (2021). Digitalisasi Publikasi Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 19(1), 132–146. <https://doi.org/10.32524/jkb.v19i1.259>
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Hiola, Y., & Harun, E. (2021). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 89. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.89-101.2021>
- Iqbal, M., Gudono, G., & Ritonga, I. T. (2018). Apakah Kecukupan Pengungkapan telah Dipertimbangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam Perumusan Opini? *Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Publik*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jaap.35329>
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *ASSETS*, 7(1).
- Narulitasari, D., & Zafira, R. (2021). Determinant of Internet Financial Reporting Disclosure. *Islamic Accounting Journal*, 1(2).
- Pandansari, T. (2016). Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(3), 463. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i3.366>
- Pratiwi, A. G., Taufik, T., & Odiatma, F. (2019). Pengaruh Karakteristik Daerah, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017). *JOM FEB*, 6(1).
- Pratiwi, R., & Aryani, Y. A. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 167. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i2.52>
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2017). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *INFO ARTHA*, 1, 97–110. <https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.72>
- Putra Setiawan, R. S., & Maryono, M. (2022). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2020. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 927–940. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2023>
- Rosadi, S., & Okfitasari, A. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan terhadap Opini Audit BPK. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(2), 148. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i2.326>
- Saputra, Y., & Ariani, N. E. (2018). Pengaruh Kompleksitas, Kemandirian dan Opini Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(4).

- Saraswati, T., Budiarti, L., & Sudiby, Y. A. (2019). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Memengaruhinya. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/rab.030138>
- Sasmita, R. P. H. (2021). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit BPK Terhadap Understandability dalam Kualitas Laporan Keuangan. *Modus*, 33(1), 98–119. <https://doi.org/10.24002/modus.v33i1.4171>
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Solihatin, Etin dan Raharjo. (2007), *Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Teriyani, T., Respati, N. W., & Fatimah, F. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 108. <https://doi.org/10.37253/gfa.v6i1.6534>
- Utami, S. R., & Sulardi, S. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 253. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i2.436>
- Waluyyanti, G. M., & Mahmud, A. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i2.7815>
- Yulianingtyas, R.R. (2010), Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi Empiris pada Kabupaten/kota di Indonesia). Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta